



INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR

LKIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021



Jl. Raya Padjajaran No. 05
Kec. Bogor Timur
Kota Bogor



Telp. (0251) 8313274
Fax. (0251) 8373229



inspektorat.kotabogor.go.id



[inspektorat_kotabogor](https://www.instagram.com/inspektorat_kotabogor)



[inspektorat Daerah Kota Bogor](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[inspektoratBGR](https://twitter.com/inspektoratBGR)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT.

Aamiin.

Bogor, 2022

INSPEKTUR KOTA BOGOR. *ly*

INSPEKTORAT DAERAH

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si., QGIA

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19700715 199009 1 002



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Bogor, 2022

INSPEKTUR KOTA BOGOR.

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si., QGIA

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19700715 199009 1 002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Tahun Anggaran 2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 pada Inspektorat Daerah Kota Bogor ini kami sampaikan. Akhirnya, semoga semua aktivitas yang kita lakukan selama ini, menjadi amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Bogor, 2022

INSPEKTUR KOTA BOGOR.

Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.Si., QGIA

Pembina Utama Muda - IV/c

NIP. 19700715 199009 1 002

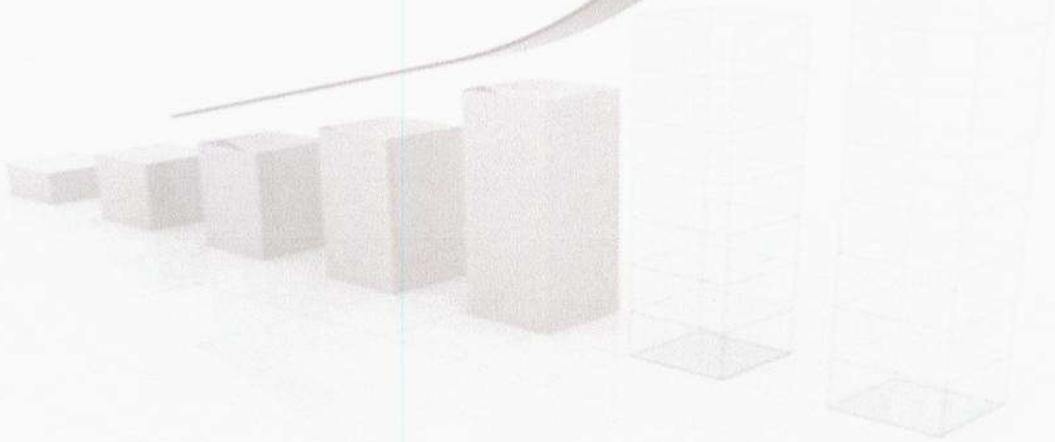
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Tugas dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Sistematika Laporan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan	8
B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	8
C. Program dan Indikator Kinerja Program	9
D. Kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/ Subkegiatan	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Target dan Kinerja Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Tahun Lalu	19
a. Target dan Kinerja Sasaran	19
b. Target dan Kinerja Program	27
1) Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor	28
2) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Bidang Pengawasan Intern	29
3) Gap Analisis Competensy	30
4) Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	32
5) Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	36



6) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal-----	37
7) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal-----	38
8) Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah-----	39
9) Persentase Capaian MCP KPK-----	40
2. Capaian Kinerja Tahun 2021 dalam Perbandingannya dengan target Capaian Perencanaan Strategis Tahun 2024-----	43
3. Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja-----	44
4. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya-----	46
5. Capaian Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan-----	47
B. Realisasi Anggaran-----	53
BAB IV PENUTUP-----	26
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

LAMPIRAN-LAMPIRAN



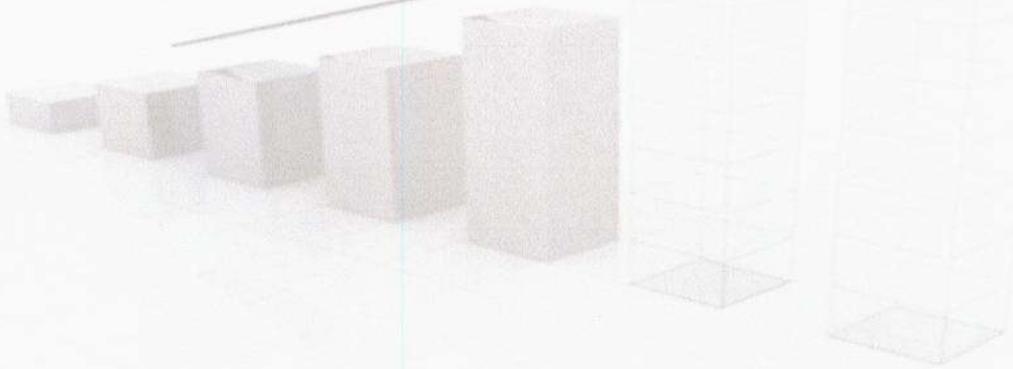
DAFTAR TABEL

Tabel 1	Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor-----	4
Tabel 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan-----	5
Tabel 3	Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor -----	9
Tabel 4	Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021 -----	9
Tabel 5	Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2021 -----	13
Tabel 6	Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-----	19
Tabel 7	Capaian Predikat Level per Elemen -----	20
Tabel 8	Perbandingan antara realisasi kinerja level kapabilitas APIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya-----	21
Tabel 9	Tingkat kematangan Implementasi SPIP-----	22
Tabel 10	Tabel Rekapitulasi Skor penilaian QA dari BPKP -----	23
Tabel 11	Perbandingan realisasi kinerja Level Maturitas SPIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya-----	23
Tabel 12	Sasaran Penerapan ISO 37001:2016 -----	26
Tabel 13	Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021-----	27
Tabel 14	Perbandingan realisasi kinerja Nilai Akip Inspektorat antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya-----	29
Tabel 15	Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2021 -----	31
Tabel 16	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor -----	33
Tabel 17	Jumlah dan Persentase PD berdasarkan kategori nilai----	33
Tabel 18	Capaian Kinerja 2021 dalam perbandingannya dengan target capaian perencanaan strategis tahun 2024 -----	43
Tabel 19	Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan kinerja sasaran Tahun 2021-----	47
Tabel 20	Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021-----	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah -----	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2021-----	3
Gambar 3	Penghargaan Level Kapabilitas APIP -----	21
Gambar 4	Penghargaan Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP--	24
Gambar 5	Sertifikasi ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management Systems -----	27
Gambar 6	Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI -----	38



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor menginformasikan tugas dan fungsi serta hasil capaian kinerja tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor yang merujuk pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 Inspektorat Daerah Kota Bogor, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dan wujud pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (Jankin) Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah menetapkan dan merealisasikan tujuan dan sasaran utama, dengan capaian kinerja Utama pada tahun 2021, yaitu terdiri atas :

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-

Capaian kinerja program sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realiasi		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,35	3,56	106,26%
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30	21,62	127,93



No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realisasi		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah							
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	70,27%	75,00%	106,73%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	80%	83,33%	104,16%
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	80	86,7	108,37%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	75	90,18	120,24%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	80	100	125%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,31	76,31	100%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

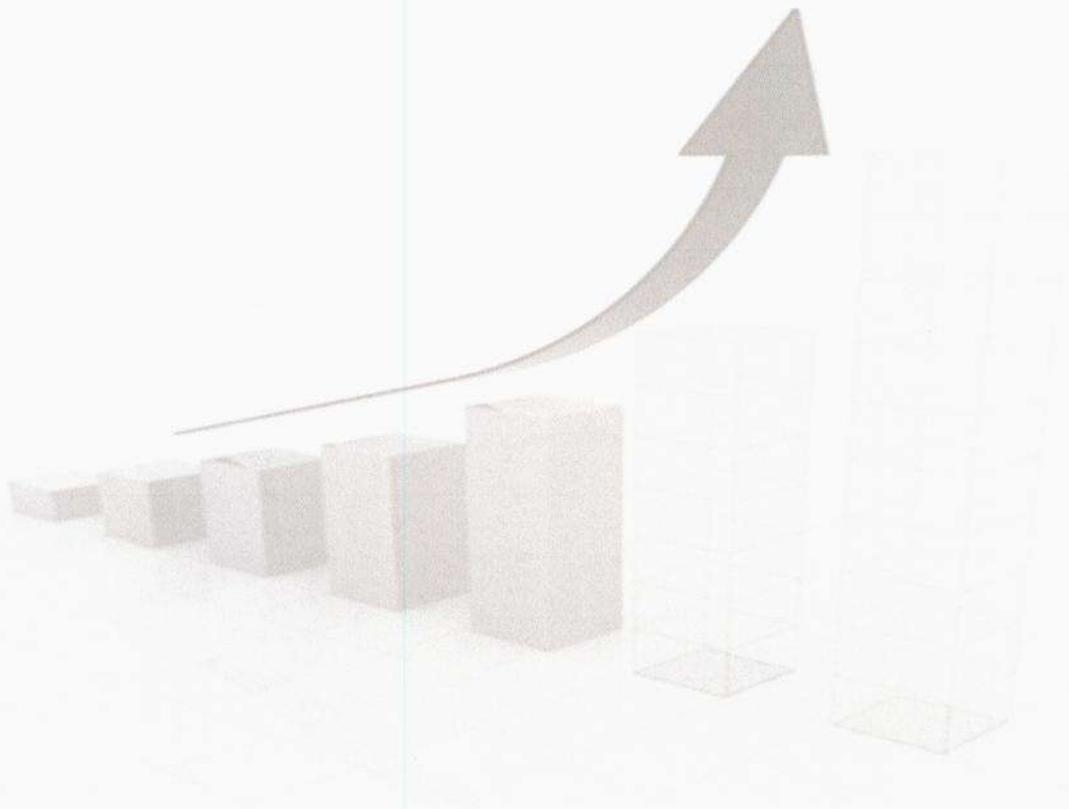
$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp16.647.657.802,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp17.223.043.441 Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 3,34% atau sebesar Rp575.385.639,00. Nilai efisiensi ini ditambah dengan nilai efisiensi refocusing sebesar Rp2.469.643.325,00 dari nilai pagu murni sebesar



Rp19.792.686.766. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran dan besaran refocusing anggaran, maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui rangkap penugasan Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah.



BAB I PENDAHULUAN

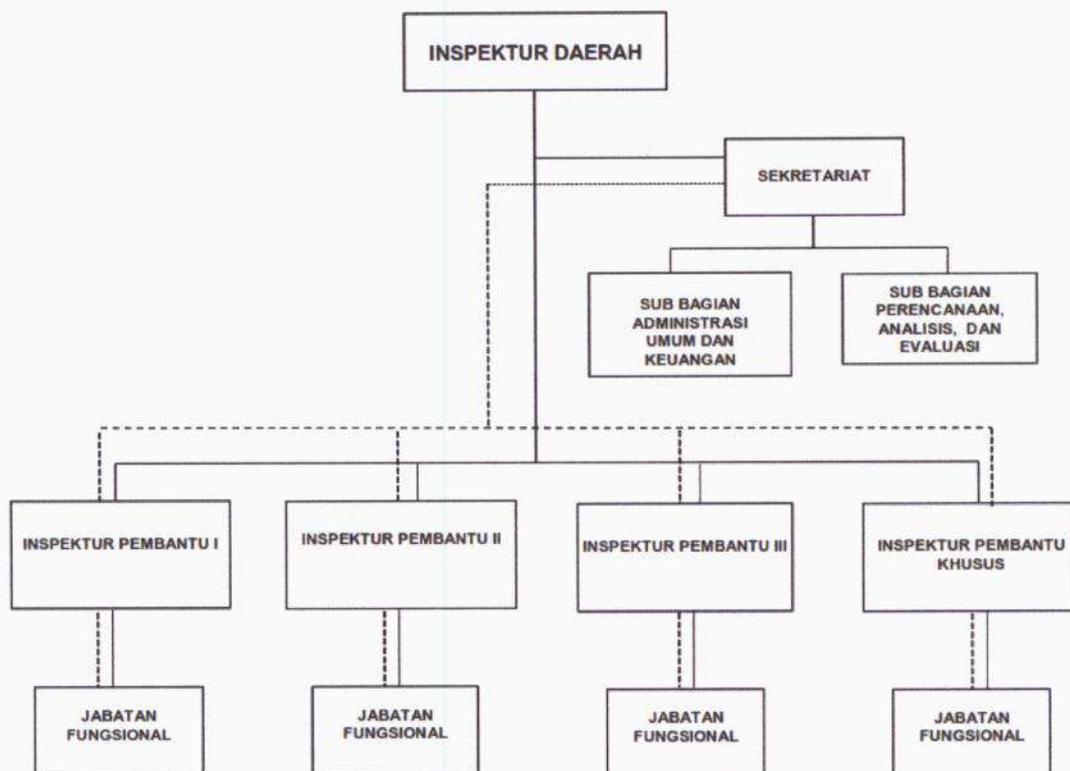
A. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional di Lingkungan Inspektorat Daerah, Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau tanpa menunggu penugasan dari Wali Kota;
4. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
5. pelaksanaan pengawasan program reformasi birokrasi;
6. penyusunan laporan hasil pengawasan;
7. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi

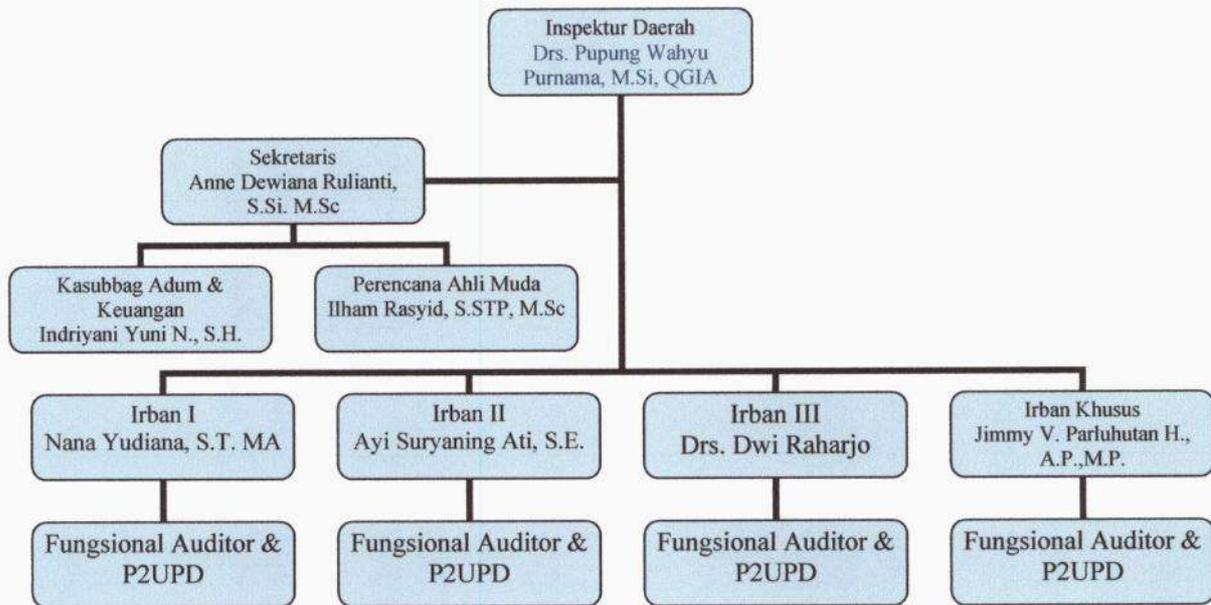
Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 17 Tahun 2021

Struktur organisasi Inspektorat Daerah Kota Bogor terdiri dari:

1. Inspektur Daerah;
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Analisis dan Evaluasi;
3. Inspektur Pembantu I membawahi Jabatan Fungsional;
4. Inspektur Pembantu II membawahi Jabatan Fungsional;
5. Inspektur Pembantu III membawahi Jabatan Fungsional;
6. Inspektur Pembantu Khusus membawahi jabatan Fungsional.



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Per 31 Desember 2021 (Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 157 Tahun 2021)

C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan visi, misi, dan tugas dan fungsi pelayanan, maka Inspektorat Daerah Kota Bogor mempunyai peran dalam mewujudkan visi di atas melalui misi kedua, **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**. Kota Bogor yang cerdas berarti tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang kolaboratif, transparan, dan melayani. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mencermati hal-hal tersebut di atas ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan jumlah jangkauan obyek pengawasan yang ada, maka terdapat Isu-isu strategis yang dihadapi Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Isu Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor

No.	Isu Strategis	Masalah	Akar Masalah
1.	Tuntutan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan bersih	1 Belum optimalnya akuntabilitas Kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	1 Sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah belum optimal
			2 belum seluruhnya rekomendasi laporan hasil reviu LKPD ditindaklanjuti
			3 Penyelenggaraan pengawasan perangkat daerah belum efektif
			4 tindak lanjut rekomendasi temuan BPK dan APIP belum optimal
			5 Persentase penerapan SPIP level 3 pada perangkat daerah masih rendah
			6 Persentase PD yang diusulkan untuk mendapatkan predikat WBK masih rendah
			7 belum lengkapnya Norma, Standar, Prosedur, Kriteria pengawasan
		2 Belum optimalnya kapabilitas APIP	1 belum meratanya kompetensi APIP

Sumber : Hasil olahan data Inspektorat Kota Bogor, 2019

Terhadap Isu strategis tersebut dan untuk mendukung Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota berikut rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Bogor dalam lima tahun mendatang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan pada sub bab ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Bogor yang Ramah Keluarga			
Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pengawasan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat	1. Meningkatkan kompetensi APIP	1) Pemberian fasilitas Diklat, Bimtek, Sosialisasi, PP SDAM kepada APIP 2) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang bagi APIP
		2. Optimalisasi penjaminan mutu dan konsultasi melalui penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis risiko	3) Penyusunan dan penyempumaan norma, standar dan prosedur pemeriksaan
			4) Penyusunan PKPT berbasis risiko
			5) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementerian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan.
		Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	3. Mendorong peningkatan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada perangkat daerah
	7) Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan melalui koordinasi dan sinergitas antar APIP, BPKP, Kementarian PAN RB dan instansi lainnya maupun dengan Objek Pemeriksaan.		
	8) Mengembangkan deteksi dini (<i>Early Warning System</i>) sebagai tindakan pencegahan dalam pengadaan barang/jasa khususnya yang berhubungan dengan pembangunan fisik.		
	9) Memantapkan peran Inspektorat dalam pemberian jasa konsultasi.		
	10) Pendampingan tenaga ahli dalam pelaksanaan pengawasan		
	11) Peningkatan pemutakhiran data tindak lanjut		

D. Sistematika Laporan

Sistematika laporan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan kinerja;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang;

7. keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau di hasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi.

Sebagai penjabaran visi dan misi Inspektorat Daerah Kota Bogor yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi, maka tujuan dari Inspektorat Daerah Kota Bogor dengan mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024 adalah *“Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel”*. Indikator tujuannya adalah level maturitas SPIP dengan target level 3.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur. Sasaran juga merupakan alat pemacu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Inspektorat Daerah Kota Bogor telah merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Tabel 3 Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor

Sasaran	Indikator	Formula Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Penilaian Mandiri dan QA Kapabilitas APIP	3	3	3	3	3
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Penilaian Tingkat Maturitas SPIP oleh BPKP	3	3	3	3	3
	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Hasil penilaian/evaluasi Tim Penilai Internal APIP terhadap unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan ke KemenpanRB	-	-	6	1	1

C. Program dan Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, maka program yang dilaksanakan Inspektorat pada Tahun Anggaran 2021, adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Target dan Program dan Indikator Kinerja Program Tahun 2021

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja Utama				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Hasil Evaluasi SAKIP	A	Poin
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Survey Kepuasan Perangkat Daerah	3,35	Poin

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja Utama				
		Uraian Indikator Kinerja	Formula Indikator Kinerja	Satuan	Satuan	
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	Gap kompetensi ASN dengan persyaratan kompetensi jabatan	30	%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah						
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	(Jumlah PD yang mencapai nilai BB keatas x 100%) / Jumlah Total PD yang dievaluasi	70,27	%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	(Jumlah PD yang sesuai dengan Akuntansi Pemerintah x 100%) / Jumlah Total PD	80	%
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Internal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	80	%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	(Jumlah Rekomendasi pengawasan Eksternal yang ditindaklanjuti x 100%) / Jumlah Rekomendasi	75	%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Prosentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	(Jumlah PD yang menyusun Manajemen Risiko x 100%) / Jumlah Total PD	80	%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	Hasil Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Monitoring Centre for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)	76,31	%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Hasil penilaian/evaluasi Tim Penilai Internal APIP terhadap unit kerja yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang telah memenuhi syarat untuk diusulkan ke KemenpanRB	-	Unit Kerja

D. Kegiatan/Subkegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan/Subkegiatan

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Kota Bogor tahun 2021 meliputi pelaksanaan 3 (tiga) program dengan 11 (sebelas) kegiatan dengan total anggaran semula sebesar Rp19.792.686.766,00 dan berkurang setelah difocusing menjadi sebesar Rp19.465.686.766,00, selanjutnya mengalami perubahan Kembali menjadi sebesar Rp17.223.043.441,00. Rencana Kinerja Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor mengalami perubahan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 5 Rencana Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2021

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan					
6.01		Inspektorat Daerah				17,223,043,441	
	Tujuan	Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Level Maturitas SPIP	3	Level		
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	3	Level		
1	6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	3,35	Poin	17,057,503,341	
			Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	A	Poin		
			Gap Analysis Kompetensi	32	%		
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Inspektorat Daerah	100	%	128,680,000	
	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	3	Dokumen	4,925,000	

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	1	Dokumen		
			Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	3	Dokumen		
			Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	3	Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	1	Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Perubahan RENSTRA PD	1	Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya	1	Dokumen		
6.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	1	Dokumen	123,755,000	
			Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	1	Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	1	Dokumen		
			Tersusunnya Laporan Pengawasan	1	Dokumen		
			Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	1	Dokumen		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	100	%	14,307,642,920	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	51	Orang	14,307,642,920	
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah data administrasi kepegawaian dan peta kompetensi	11	Laporan	358,378,000	
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-Undangan		Terselenggaranya pelatihan bagi APIP	8	Kali	358,378,000	
			Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Fungsional Auditor	8	Peserta		
			Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyipuan)	1	Kali		

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan		Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
			Qty	Satuan	Qty	Satuan		
6.01.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	100	%		862,739,177	
6.01.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan	1	Bulan		158,293,777	
			Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan	1	Bulan			
			Tersedianya peralatan /alat dapur	1	paket			
			Tersedianya PIN APIP	51	buah			
			Honorarium Tim PBJ kegiatan	6	OB			
6.01.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas	48	Tabung		42,005,200	
			Isi Ulang Galon Air Mineral	540	galon			
			Pengadaan Barang Cetak	39	Meter			
			Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	12	Bulan			
			Pengadaan tabung gas elpiji 12 kg	3	Buah			
			Pengadaan alat listrik pakai habis	12	Bulan			
6.01.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjilidan	12	Bulan		24,279,200	
6.01.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	12	Bulan		638,161,000	
6.01.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengemban SIMAPAN	0	Paket		-	
			Pengembangan Website Inspektorat Daerah	0	Paket			
6.01.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	85	%		322,673,448	
6.01.01.2.07.05		Pengadaan Mebel	Tersedianya buffet	1	Unit		41,552,348	
			Tersedianya Filling Cabinet	2	Unit			
			Tersedianya lemari Arsip 2 pintu Sliding Kunci	2	Unit			
			Tersedianya Sofabed	1	Set			
6.01.01.2.07.06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Conference Cam/Video	3	Set		281,121,100	

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			Tersedianya Notebook	5	Unit		
			Tersedianya PC (Personal Computer)	1	Unit		
			Tersedianya PC (Personal Computer) All In One	3	Unit		
			Tersedianya Projector	1	Unit		
			Tersedianya Router Wifi	5	Unit		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	535,997,796	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Langganan Surat Kabar Harian	12	Bulan	199,074,460	
			Pemenuhan Biaya Tagihan Air	12	Bulan		
			Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	12	Bulan		
			Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	12	Bulan		
			Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	12	Bulan		
			Pemuatan Publikasi Kinerja	4	Kali		
			Pemeliharaan jaringan listrik	1	Paket		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Pemenuhan Jasa Pengemudi	12	Bulan	336,923,336	
			Pemenuhan Jasa Pramubhakti	12	Bulan		
			Pemenuhan Jasa Tenaga FO	12	Bulan		
			Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	12	Bulan		
			Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	12	Bulan		
			Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	12	Bulan		
			Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	12	Bulan		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah	100	%	541,392,000	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Terpeliharanya kendaraan dinas	7	Unit	263,430,000	
			Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	12	Bulan		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya AC Split	13	unit	57,500,000	
			Terpeliharanya	11	unit		

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			Mesin Pencacah Kertas				
			Terpeliharanya Mesin Tik Elektrik	1	unit		
			Terpeliharanya PC/Notebook	43	unit		
			Terpeliharanya Printer	22	unit		
			Terpeliharanya sound system	1	unit		
	6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	unit	220,462,000	
	Sasaran	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	3	Level		
			Jumlah Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	6	Unit kerja		
2	6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	70.27	%	49,875,000	
			Persentase penanganan pengaduan masyarakat	100	%		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	80	%		
			Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	75	%		
			Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	80	%		
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	%	27,975,000	
			Persentase capaian target pengawasan keuangan daerah	100	%		
			Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	2	kegiatan		
			Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi	2	kegiatan		

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			pengawasan Eksternal				
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		Dokumen Pemeriksaan Kinerja	9	PD	11,300,000	
			Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021	3	Dok		
			Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	1	Dok		
			Dokuman Reviu Kinerja UKPBJ	1	Dok		
			Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	1	Dok		
			Reviu Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	1	Dok		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Dokumen pemeriksaan BOS	1	Laporan	4,500,000	
			Dokumen Penyerapan Anggaran barang dan jasa	4	Kali		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja		Reviu Dokumen Renstra	36	PD	6,925,000	
			Dokumen Reviu RPJMD	1	Dok		
			Dokumen Reviu RKPD	1	Dok		
			Dokumen Reviu RKPD Perubahan	1	Dok		
			Dokumen Reviu KUA PPAS	1	Dok		
			Reviu Dokumen RKA	36	PD		
			Reviu Dokumen RKA Perubahan	36	PD		
			Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	36	PD		
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan		Reviu LKPD	1	Laporan	2,250,000	
			Reviu DAK	1	Laporan		
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah pemantauan tindak lanjut	8	Pemantuan	3,000,000	
			Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	1	Laporan		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Persentase laporan pengaduan yang diselesaikan sesuai kewenangan	100	%	21,900,000	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah	1	Dokumen	12,350,000	

→ ?

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			(TPKD)				
	6.01.02.2.02.02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase PDTT terhadap PD	100	%	9,550,000	
3	6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase penerapan SPIP pada perangkat daerah	80	%	115,665,100	
			Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	6	Unit Kerja		
			Persentase Capaian MCP KPK	76,31	%		
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah jenis dokumen NSPK di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang disusun	2	dokumen	9,670,000	
	6.01.03.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Dokumen SOP Bidang Pengawasan	2	dokumen	9,670,000	
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang menyusun Manajemen Risiko	80	%	105,995,100	
			Jumlah unit kerja yang dilakukan pendampingan pelaksanaan RB bidang penguatan pengawasan dan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	12	Unit Kerja		
			Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring dan evaluasi MCP KPK Pemerintah Kota Bogor	2	kegiatan		
	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	36	Dokumen	35,904,000	
			Jumlah Pembinaan /monitoring kinerja PD	36	PD		
		FGD Peningkatan SPIP	36	PD			
		Pendampingan BPKP, Menpan dan Mendagri dalam mendukung Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	12	Kali			
		Jumlah PD yang dilakukan pembinaan /pendampingan	5	PD			

NO	Kode Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/ Perubahan	Target Kinerja Perubahan		Pagu Anggaran APBD 2021 Perubahan	Ket
				Qty	Satuan		
			penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran				
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	8	PD	3,180,000		
		Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zi	1	Kali			
		Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB	2	Kali			
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	2	laporan	3,180,000		
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya sosialisasi Penegakan Integritas	1	Kali	63,731,100		
		Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Zona Integritas/Benturan Kepentingan	1	Kali			

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan Kinerja Tahun 2021 dan Perbandingannya dengan Tahun Lalu

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja serta membandingkannya

a. Target dan Kinerja Sasaran

Target dengan realisasi masing masing indikator kinerja sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-

Keterangan:

**) Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM lingkup Pemerintah Kota Bogor masih dalam tahap penetapan 6 (enam) Perangkat Daerah yang menjadi pilot proyek pembangunan melalui Keputusan Wali Kota Bogor nomor 700/Kep.876-itda/2021 tentang Penetapan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor yang diusulkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayan dalam Pembangunan Zona Integritas.*

**Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Tata
Kelola Pelayanan Inpektorat**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%

Sasaran ini merupakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam lima tahun mendatang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah. Sasaran ini memiliki target indikator kinerja Level Kapabilitas APIP level 3. Kapabilitas Aparat Intern Pemerintah (APIP) adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.

Pada tahun 2021 kapabilitas APIP mendapatkan level 3. Kapabilitas APIP Kota Bogor dinilai oleh BPKP Pusat berdasarkan surat laporan Nomor : LQAPIP-1027/PW10/6/2019 tanggal 27 Desember 2019. Berdasarkan hasil tersebut APIP Kota Bogor mendapatkan predikat level 3 (integrated). Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7 Capaian Predikat Level per Elemen

No	Elemen	Level
1	Peran dan Layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

Level Kapabilitas APIP Level 3 disebut Integrated, menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar, dengan outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan

dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Tabel 8 Perbandingan antara realisasi kinerja level kapabilitas APIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya

	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
Level Kapabilitas APIP	3	3	3
Interpretasi	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
Tingkat / Level Kapabilitas APIP	3	3	3



Gambar 3 Penghargaan Level Kapabilitas APIP

Sasaran pertama ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari kegiatan berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Sasaran 2 :Meningkatnya akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-

Indikator Level Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Level maturitas SPIP bertujuan mengetahui penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Perkembangan Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kota Bogor dimulai sejak Tahun 2017 dengan nilai 1,43 (rintisan). Pada Tahun 2018 dilakukan penilaian BPKP dengan hasil yang masih sama. Terkait dengan hal ini, Inspektorat Daerah Kota Bogor menargetkan Level Maturitas SPIP sejak Tahun 2019 berada pada level 3 dengan tingkat kematangan terdefinisi. Tingkat kematangan Implementasi SPIP diukur dalam skala 0 hingga 5 dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 9 Tingkat kematangan Implementasi SPIP

Level	Tingkat Maturitas	Interval Score
0	Belum ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{score} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Pemerintah Daerah Kota Bogor pada akhir tahun 2019 mendapatkan predikat level maturitas SPIP yaitu level 3. Level 3 merupakan interpretasi dari TERDEFINISI yang artinya kebijakan/SOP telah diimplementasikan oleh sebagian besar pejabat dan pegawai terkait dan/atau unit kerja dilingkungan K/L/D serta bukti adanya implementasi kebijakan/SOP telah didokumentasikan dengan baik. Penilaian level ini dilakukan oleh BPKP untuk mengukur kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada suatu Pemerintah Daerah dari level 1 sampai level 5.

Berdasarkan penilaian dan laporan hasil *Quality Assurance* (QA) oleh BPKP Pusat atas penilaian level maturitas SPIP Pemerintah Kota Bogor untuk tahun 2020 dan tahun 2021 dinyatakan Lulus untuk Level 3. Terkait dengan pencapaian hal ini maka target Level Maturitas SPIP pada Tahun 2021 berada pada level 3, dinyatakan **Sudah tercapai**.

Tabel 10 Tabel Rekapitulasi Skor penilaian QA dari BPKP

No.	Unsur SPIP	Skor Hasil QA
1	Lingkungan Pengendalian	3
2	Penilaian Risiko	3
3	Kegiatan Pengendalian	3
4	Informasi dan Komunikasi	3
5	Pemantauan	3

Tabel 11 Perbandingan realisasi kinerja Level Maturitas SPIP antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya

	Capaian Tahun 2017	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Capaian Tahun 2020	Capaian Tahun 2021
Level Maturitas SPIP	1,47	1,47	3	3	3
Interpretasi	Rintisan	Rintisan	Terdefinisi	Terdefinisi	Terdefinisi
Tingkat / Level Maturitas SPIP	2	2	3	3	3



**DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan Hasil *Quality Assurance* memberikan penghargaan kepada:

Pemerintah Kota Bogor

atas prestasinya dalam pencapaian

MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP LEVEL 3

*dalam hal ini

Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFA, ASEAN CPA

Sasaran ini didukung oleh Program:

- 1) Program Penyelenggaraan Pengawasan, kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, kegiatan:
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
 - b) Pendampingan dan Asistensi.

Kinerja Tambahan :

Membangun budaya kerja profesional dan berintegritas serta sebagai role model bagi perangkat daerah lain

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Sertifikasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016	Sertifikat	1	1	100%

Kebijakan Anti Penyuapan

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan SNI ISO 37001: 2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

- 1) Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
- 2) Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa menolaknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayanan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
- 3) Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
- 4) Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
- 5) Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembalasan terkait dengan pelaporan penyuapan;
- 6) Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 7) Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- 8) Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaiannya secara terus menerus.

Capaian Sasaran Mutu Penerapan ISO 37001:2016

Pencapaian sasaran mutu dan pemantauan serta hasil pengukuran hasil kinerja dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan diukur dengan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Pencapaian sasaran penerapan dilakukan pengukuran per tanggal 22 September 2021. Adapun secara ringkas hasil pencapaian sasaran terhadap indikator adalah sebagai berikut :

Tabel 12 Sasaran Penerapan ISO 37001:2016

No	Sasaran	Target	Pencapaian per 24 Sept 2021
1	Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	100 %	100%
2	Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuapan	100 %	100%
3	Laporan Pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang ditidakklanjuti	100 %	100%
4	Tidak ada Penyedia barang dan Jasa/Rekan bisnis di Inspektorat yang terlibat dalam penyuapan	100 %	100%
5	Penegakan sanksi terhadap personil yang terlibat penyuapan	100 %	100%
6	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah /Lembaga /Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	83,5%	86,70%



CERTIFICATE

No. 008/MHI-SMAP

Diberikan kepada/Awarded to

Inspektorat Daerah Kota Bogor

Alamat/Address

Jl. Pajajaran No 5, Kelurahan Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

telah menerapkan/has implemented

Sistem Manajemen Anti Penyuapan

Anti Bribery Management System

sesuai standar/which comply with

SNI ISO 37001:2016

Tanggal pengesahan/Approval date : 5 November 2021
Berlaku sampai dengan/Valid until : 4 November 2024

A. Irwan Aten
President Director

PT Mutu Hijau Indonesia

Mangala Wanabakti Building, Blok IV, 9th Floor, Room 931 C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta - 10270
Phone: +62 (21) 57853706-07, Fax: +62 (21) 57853708
Website: www.mutihijau.com

b. Target dan Kinerja Program

Pengukuran tingkat capaian kinerja sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing masing indikator kinerja.

Tabel 13 Realisasi Indikator Program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Realisasi	Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target			
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah						
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,35 (Skala 4)	3,56 (Skala 4)	106,26%
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30 (max)	21,62	127,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah						
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	70,27%	75,00%	106,73%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	80%	83,33%	104,16%
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	80	86,7	108,37%

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja					Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realiasi		
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	75	90,18	120,24%
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	80	100	125%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,31	76,31	100%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-

1) Nilai AKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor

Nilai AKIP Inspektorat Daerah diukur dari hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Inspektorat Daerah Kota Bogor. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Inspektorat Daerah Kota Bogor pada tahun 2021 memperoleh nilai 84,9 dengan kriteria "A" (Memuaskan >80 – 90), mengalami peningkatan poin nilai dengan hasil penilaian tahun sebelumnya adalah sebesar 82,33 dengan kriteria "A" (Memuaskan >80 – 90). Hasil penilaian komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Perbandingan realisasi kinerja Nilai Akip Inspektorat antara capaian tahun ini dengan tahun sebelumnya

No	Komponen	Bobot (%)	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,58	29,40
2.	Pengukuran Kinerja	25	20,31	21,46
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,68	12,46
4.	Evaluasi Internal	10	6,85	7,88
5.	Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi	20	14,91	13,75
	Jumlah	100	82,33	84,95

2) Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Bidang Pengawasan Intern

Kuesioner kepuasan pengawasan oleh Inspektorat Kota Bogor merupakan suatu alat ukur intern terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan pada perangkat daerah dan Pemerintah Kota Bogor. Umpan balik dari pengguna jasa pengawasan yang dalam hal ini perangkat daerah sebagai bahan perbaikan berkelanjutan terhadap pengawasan oleh Inspektorat. Dari 266 responden pegawai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terhadap 20 indikator pengukuran melalui penyebaran google form diperoleh 6 hasil pengukuran dengan skala presentase 100% dan skala 4, adalah sangat baik, dengan rincian yaitu :

- a) Tingkat Kepuasan Jasa Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor nilai 89,19 % (Indeks : 3,57);
- b) Tingkat Independensi Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor nilai 89,95 % (Indeks : 3,60);
- c) Tingkat Integritas Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor nilai 89,83 % (Indeks : 3,59);
- d) Tingkat Profesionalisme Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor nilai 88,21 % (Indeks : 3,51) ;
- e) Tingkat Tingkat Kepuasan Jasa Konsultan/ Advice Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor 89,45 % (Indeks : 3,58); dan
- f) Tingkat Kemanfaatan Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor nilai 89,45 % (Indeks : 3,58).

Hasil pengukuran tingkat kepuasan Inspektorat tahun 2021 secara umum dinyatakan dalam kategori SANGAT BAIK (rata-rata 89,07 %, Indeks 3,56), mengalami peningkatan rata-rata indeks kepuasan dari tahun sebelumnya dengan nilai 86,73% (Indeks 3,46) kategori SANGAT BAIK.

3) Gap Analisis Competency

Berdasarkan Pasal 162 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pengembangan kompetensi PNS merupakan salah satu mata rantai dalam manajemen

karier PNS yang harus dilakukan dengan menerapkan prinsip sistem merit, artinya harus dilakukan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi paling kurang meliputi pendidikan dan pelatihan (diklat), seminar, kursus, penataran, sekolah kader/pelatihan kader dan magang. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh Inspektorat dilakukan melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Bimbingan Teknis, Seminar dan Diklat Sertifikasi Profesi. Penyelenggaraannya menggunakan kurikulum dan silabus dari lembaga pendidikan pengawasan (Pusdiklatwas BPKP dan lembaga pendidikan lainnya). Pengembangan pegawai yang diselenggarakan di tahun 2021:

Tabel 15 Daftar Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Tahun 2021

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
1.	Diklat Manajemen Pengawasan	1	18 – 22 Oktober 2021
2.	Diklat Fraud Auditing 1	1	7 – 10 Desember 2021
3.	Diklat Fraud Auditing 2	1	14 – 17 Desember 2021
4.	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	1	20 – 28 Desember 2021
5.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	1	29 Juni – 8 Juli 2021
6.	Diklat Audit Intern Berbasis Risiko	3	
7.	Diklat Penjenjangan Auditor Muda	6	27 September – 7 Oktober 2021
8.	Diklat Penjenjangan Auditor Pertama	1	9 – 27 September 2021

No	Nama Diklat	Jumlah Peserta	Waktu Pelaksanaan
9.	Diklat Penjenjangan Auditor Madya	2	18 – 26 Agustus 2021
10.	Pelatihan Pengenalan SNI ISO 37001:2016	50	22 Maret 2021
11.	Pelatihan Pengenalan SNI ISO 37001:2016	13	23 – 25 Maret 2021
12.	Bimbingan Teknis Audit Kinerja	35	2 – 4 Juni 2021
13.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Hasil Audit	34	13 – 14 Oktober 2021
14.	Diklat Sertifikasi QGIA	2	
15.	Diklat Sertifikasi CRMP	1	
16.	Diklat Sertifikasi CRMO	1	
17.	Diklat Sertifikasi CFRA	1	

Pengembangan kompetensi tersebut bertujuan serta meningkatkan Pengetahuan (Knowledge), Keterampilan (Skill) dan juga sikap (Attitude) sehingga terwujud profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP). Setelah dilakukan pengembangan kompetensi gap kompetensi mengalami penurunan dari **30% menjadi 21,62%**.

4) Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal “BB”

Ukuran akuntabilitas kinerja dan keandalan sistem manajemen kinerja Perangkat Daerah yang merupakan hasil pencapaian penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah (Audit, Reviu, Evaluasi, Monitoring dan *consulting*).

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, bahwa Pengawasan Intern harus menilai dan memberikan rekomendasi yang memadai untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi dalam:

- Membuat keputusan strategis dan operasional;
- Mengawasi manajemen risiko dan pengendalian;
- Mendorong penerapan etika dan nilai-nilai organisasi;
- **Memastikan efektivitas pengelolaan dan akuntabilitas kinerja organisasi;**
- Mengomunikasikan informasi risiko dan pengendalian pada area yang sesuai dalam organisasi; dan

- o Mengoordinasikan kegiatan dan mengomunikasikan informasi diantara Pimpinan K/L/D, Pimpinan Unit Organisasi, auditor ekstern dan intern, para penyedia jasa asuransi lainnya, serta Pimpinan Unit Kerja.

Evaluasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2021 memperoleh nilai rata-rata 76,40% dengan predikat “BB” (Sangat Baik), sedangkan hasil evaluasi tahun sebelumnya memperoleh nilai rata-rata 73,34% dengan predikat “BB” (Sangat Baik) dengan akumulasi seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi sebagai berikut:

Tabel 16 Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Kota Bogor

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2020	2021
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,77	25,73
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,70	19,51
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,02	11,21
4.	Evaluasi Internal	10	5,52	5,35
5.	Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	20	14,33	14,60
	Jumlah	100	73,34	76,40

Rekapitulasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Jumlah dan Persentase PD berdasarkan kategori nilai

No	Kategori Nilai	Jumlah PD	Jumlah PD
		Tahun 2020	Tahun 2021
1.	AA (Sangat Memuaskan)	-	-
2.	A (Memuaskan)	6	10
3.	BB (Sangat Baik)	21	17
4.	B (Baik)	9	8
5.	CC (Cukup/memadai)	-	1
6.	C (kurang)	-	-
7.	D (Sangat Kurang)	-	-
	Jumlah	36	36

Tahun 2021 jumlah perangkat daerah yang mendapat nilai SAKIP “BB” ke atas sebanyak 27 perangkat daerah atau sebesar 75%.

Beberapa kelemahan dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kota bogor sebagai berikut:

- a) Masih terdapat ketidakselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Masih terdapat dokumen Renstra yang tidak memuat indikator tujuan beserta targetnya dan masih terdapat indikator kinerja yang belum berorientasi hasil;
- b) Belum terdapat Indikator Kinerja Individu (IKI) yang mengacu kepada IKU unit kerja organisasi/atasannya dan hanya kepada Eselon III dan IV;
- c) Monitoring dan evaluasi dari program/kegiatan/sub kegiatan hanya mencantumkan realisasi/belum menyajikan evaluasi dan analisis dari pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta analisis hambatan, solusi, rencana perbaikan/rekomendasi sehingga hasil evaluasi tersebut belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata;
- d) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas belum dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- e) Capaian kinerja Perangkat Daerah pada umumnya belum mencapai hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini sebagai dampak kondisi pandemi Covid-19;
- f) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah Rencana Strategis dan target jangka

menengah dalam RPJMD, belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya serta belum menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;

- g) Belum adanya mekanisme atas monitoring dan evaluasi target capaian kinerja jangka menengah yang memuat mekanisme pelaksanaan yang dilakukan secara periodik, sehingga monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja juga belum dilakukan secara periodik.

Terhadap kelemahan-kelemahan yang telah tersebut di atas, direkomendasikan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor untuk melakukan hal berikut:

- a) Menyempurnakan dan menyelaraskan antara RPJMD, Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, dan Indikator Kinerja Utama (IKU) supaya lebih menggambarkan hasil (*outcome oriented*) dengan indikator kinerja yang SMART;
- b) Menyusun IKI yang mengacu kepada IKU unit kerja Organisasi/atasannya dan hanya kepada Eselon III dan IV;
- c) Melaksanakan monitoring dan Evaluasi program/kegiatan /sub kegiatan dengan menyajikan evaluasi dan analisis dari pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan serta analisis hambatan, solusi, rencana perbaikan/rekomendasi sehingga hasil evaluasi tersebut dapat ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program di masa yang akan datang dan dalam bentuk langkah nyata;
- d) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat Eselon IV ke atas agar dikaitkan dan dimanfaatkan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- e) Memanfaatkan rencana kerja tahunan dalam penyusunan anggaran yang mempersyaratkan target-

target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan dalam pengajuan dan pengalokasian anggaran;

f) Menyempurnakan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja sebagai berikut:

(1) Memanfaatkan sepenuhnya laporan kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan yang digunakan untuk penilaian kinerja serta informasi yang disajikan dan digunakan untuk perbaikan perencanaan serta peningkatan kinerja;

(2) Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

g) Menyusun mekanisme atas monitoring dan evaluasi target capaian kinerja jangka menengah yang memuat mekanisme pelaksanaan yang dilakukan secara periodik.

5) Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan bagian dari reformasi di bidang keuangan negara yang mengharuskan pemerintah pusat maupun daerah untuk memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan keuangan pemerintah. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, basis akuntansi Pemerintah Indonesia telah berubah arah dari basis kas menuju basis akrual dan standar akuntansi tersebut secara penuh wajib diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah seluruh Indonesia paling lambat pada Tahun Anggaran 2015. Hal ini membawa konsekuensi bagi Pemda untuk menyajikan Laporan Keuangan (LK) mulai Tahun Anggaran (TA) 2015 sampai dengan sekarang berbasis akrual, sehingga apabila tidak disajikan berbasis akrual maka BPK dapat memberikan opini selain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor menunjukkan peningkatan akuntabilitas keuangan. Hal

ini dapat dilihat pada opini BPK RI atas LK Pemerintah Daerah Kota Bogor selama 5 (lima) tahun berturut-turut mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut tidak lepas dari dorongan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam mendorong dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perangkat daerah melalui kegiatan pengawasan Intern berupa Audit Kinerja, Reviu Perencanaan Anggaran, dan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian tersebut merupakan salah satu sasaran Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Indikator kinerjanya adalah persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintah.

Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor. Tujuannya untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan standar Akuntansi Pemerintahan. Hasil reviu menunjukkan terdapat 6 perangkat daerah dari 36 perangkat daerah yang diberikan catatan rekomendasi perbaikan laporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 30 perangkat daerah (83,33%) telah sesuai standar akuntansi pemerintah.

6) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal

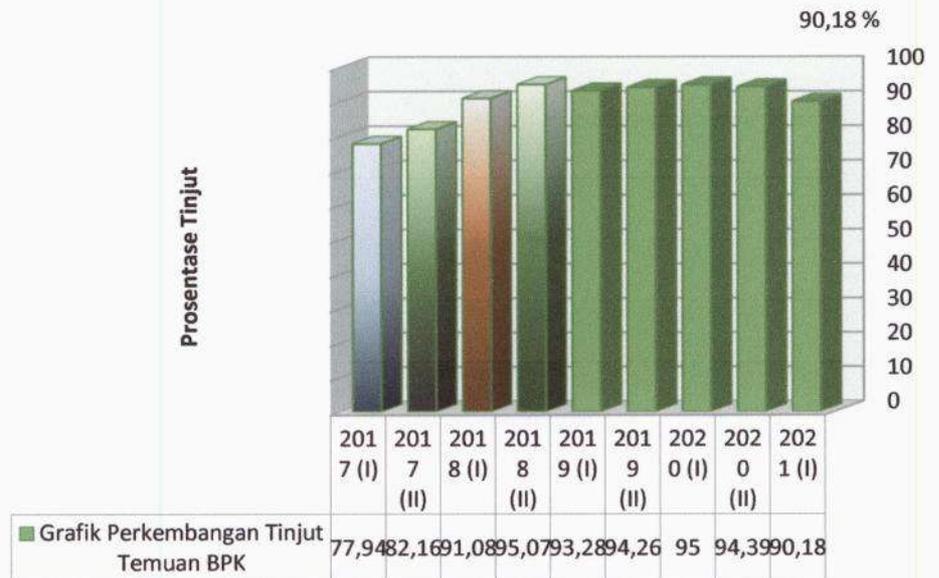
Monitoring dan evaluasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan eksternal BPK RI dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali:

- a) Monitoring tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI periode tahun 2004 sd 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 15 sd 19 Februari 2021;
- b) Monitoring dan evaluasi tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD TA 2020 dan Kinerja Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pada tanggal 4 - 13 Agustus 2021;

- c) Monitoring dan evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan pada tanggal 15 – 30 November 2021.

Persentase tindak lanjut pengawasan eksternal sebesar 90,18%. Angka ini merupakan angka kumulatif perkembangan tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI sebagaimana gambar berikut:

Gambar 6 Grafik Perkembangan Tindak Lanjut Temuan BPK RI



7) Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal

a) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

Sampai dengan bulan Desember 2021 (Semester II Tahun 2021) Inspektorat Provinsi Jawa Barat hanya melakukan monitoring TLHP dan belum dilakukan pemutakhiran data TLHP. Hasil pemantauan tindak lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi Jawa Barat dari tahun 2011 sampai dengan 2020 yaitu terdapat 117 temuan dengan 196 rekomendasi dengan penyelesaian tindak lanjut sudah selesai sebanyak 170 rekomendasi, dalam proses 15 rekomendasi dan sisanya 11 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16 Persentase Tindak Lanjut Pengawasan Inspektorat Provinsi Jawa Barat

No.	Tahun Pemeriksaan	Temuan	Rekom	Tindak Lanjut		
				S	DP	B
1	Tahun 2020	16	19	16 (84,21%)	3	0
2	Tahun 2019	3	13	13 (100%)	0	0
3	Tahun 2018	25	40	39 (97,5%)	1	0
4	Tahun 2017	5	15	15 (100%)	-	-
5	Tahun 2016	7	16	16 (100%)	-	-
6	Tahun 2015	21	29	29 (100%)	-	-
7	Tahun 2014	4	12	12 (100%)	-	-
8	Tahun 2013	5	5	2 (40%)	3	-
9	Tahun 2012	10	22	6 (27,27%)	5	11
10	Tahun 2011	21	25	22 (88%)	3	-
Jumlah Keseluruhan		117	196	170 (87,0%)	15 (6,78%)	11 (6,22%)

b) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kota Bogor

Pada Tahun 2021 terdapat 2 (dua) kegiatan pelaksanaan Audit:

- (1) Audit dengan tujuan tertentu terkait pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Reguler APBN TA 2021 pada SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA) terdapat 18 temuan dan 37 rekomendasi. dari temuan tersebut sebanyak 33 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebanyak **89,19%**.

- (2) Audit Kinerja Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Hidup dan Audit Kinerja Program Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Berdasarkan LHA terdapat 13 temuan dan 24 rekomendasi. LHA tersebut terbit di bulan Desember 2021, sehingga tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti di tahun 2022.

Berdasarkan tindak lanjut hasil pengawasan internal (Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah Kota

Bogor) diperoleh rata-rata persentase tindak lanjut hasil pengawasan internal **sebesar 86,7%**.

8) Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan Menteri/Kepala/Ketua/pimpinan tertinggi Kementerian/ Lembaga, gubernur, bupati, dan walikota untuk mengimplementasikan SPIP di lingkungannya dan merupakan bagian yang integral dalam proses manajemen pemerintahan. Penerapan SPIP secara efektif diharapkan dan diyakini akan terbangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance government*) yang berdampak pada peningkatan efisiensi serta efektifitas atas pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di seluruh jajaran pemerintahan.

Pengelolaan risiko merupakan yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan SPIP, semakin baik suatu organisasi dalam mengelola risiko maka akan semakin baik penyelenggaraan SPIP, sehingga ukuran keberhasilan penerapan SPIP dilihat dari jumlah perangkat daerah yang telah menyusun pengelolaan risiko (*risk management*) pada setiap proses bisnis.

Inspektorat Daerah Kota Bogor telah melakukan pendampingan kepada 36 perangkat daerah dalam penyusunan pengelolaan risiko tahun 2022 melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tanggal 17 s.d. 18 November 2021. Sebanyak 36 perangkat daerah (**100%**) telah menyusun dokumen pengelolaan risiko tahun 2022. Dokumen pengelolaan risiko tahun 2022 tersebut telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor mulai tanggal 12 Januari s.d. 4 Februari 2022. Reviu tersebut bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan kessuaian pada hasil penilaian risiko dan rencana tindak pengendalian pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Secara umum catatan hasil reviu dokumen pengelolaan risiko sebagai berikut:

- a) Memperbaiki pernyataan risiko yang belum tepat.
- b) Melengkapi dan memperbaiki pemilik risiko/ penanggung jawab yang belum jelas.

9) Persentase Capaian MCP KPK

Monitoring Center For Prevention (MCP) Sebagai Instrument pencegahan Korupsi. Upaya pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah salah satunya dilakukan melalui program MCP. Program ini merupakan pelaksanaan dari tugas KPK dalam koordinasi dan monitoring upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi difokuskan pada pembangunan sistem dan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan potensi korupsi di daerah serta dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Capaian MCP Pemerintah Kota Bogor **sebesar 76,31%**. Capaian MCP > 75% menunjukkan implementasi yang baik dalam melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4) Pengawasan APIP, (5) Manajemen ASN, (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan (7) Manajemen Aset Daerah sebagaimana progress keberhasilan MCP berikut:

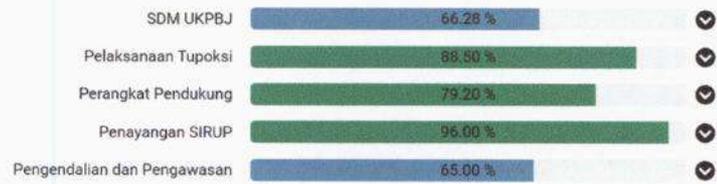
Progres Keberhasilan Pemda Pemerintah Kota Bogor



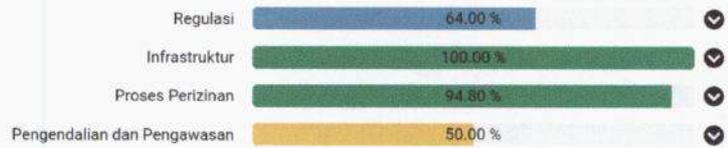
Progres Indikator pada Perencanaan dan Penganggaran APBD



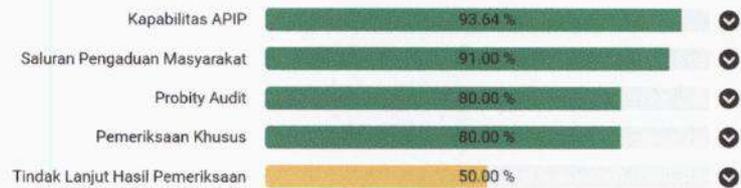
Progres Indikator pada Pengadaan Barang dan Jasa



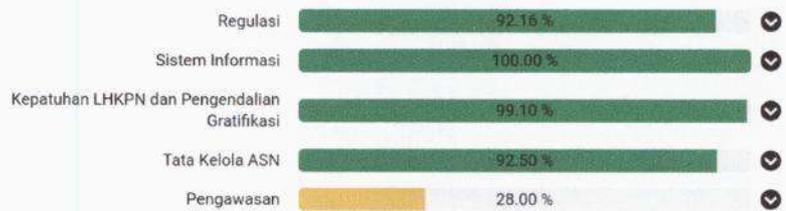
Progres Indikator pada Perizinan



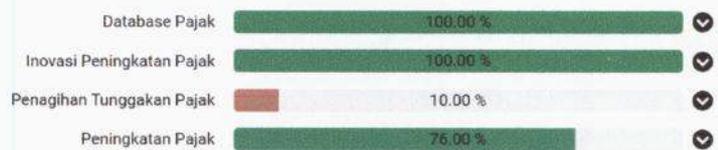
Progres Indikator pada Pengawasan APIP



Progres Indikator pada Manajemen ASN



Progres Indikator pada Optimalisasi Pajak Daerah



Progres Indikator pada Manajemen Aset Daerah



2. Capaian Kinerja Tahun 2021 dalam Perbandingannya dengan target Capaian Perencanaan Strategis Tahun 2024

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Inspektorat Daerah Kota Bogor sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18 Capaian Kinerja 2021 dalam perbandingannya dengan target capaian perencanaan strategis tahun 2024

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase (%)	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Realiasi Kinerja Tahun 2021		
I	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	BB	A	112
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,50	3,56	101,71
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	20	21,62	91,9%
II	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	-	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100
		-	Jumlah Unit Kerja yang Diusulkan mendapat	Unit Kerja	8	-	-

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase (%)	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Akhir RPJMD	Realiasi Kinerja Tahun 2021		
			Predikat WBK/WBBM				
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	80	75	93,75
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	95	83,33	87,71
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	90	86,7	96,33
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	90	90,18	100,20
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	90	100	111,11
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	77	76,31	99,10
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	8	-	-

Pada tabel 17 perbandingan capaian kinerja dengan target Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2019 – 2024 terdapat keberhasilan capaian kinerja strategis yaitu Level kapabilitas APIP dan Level Maturitas SPIP yang sudah mencapai target 100%. Untuk Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan predikat WBK/WBBM, Inspektorat Daerah Kota Bogor

mentargetkan di tahun 2022 melakukan pendampingan terhadap 6 unit kerja untuk pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dan sampai dengan kondisi tahun 2024 ditargetkan berjumlah 8 (delapan) unit kerja.

3. Faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

a. Keberhasilan capaian nilai SAKIP Inspektorat Daerah Kota Bogor

- 1) Keselarasan antara RPJMD, Renstra, Renja dan IKU
- 2) Capaian kinerja telah mencapai hasil yang lebih baik dari sebelumnya;

b. Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Bidang Pengawasan Intern

- 1) Meningkatnya kompetensi Auditor Inspektorat Daerah Kota Bogor, yang berdampak pada peningkatan profesionalisme Auditor dalam pengawasan intern;
- 2) Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016, sehingga terbangun integritas dan independensi dalam melakukan pengawasan intern.

c. Gap Analisis Competensy

- 1) Proses pengembangan kompetensi terus menerus dan berkelanjutan melalui Diklat Substantif, Diklat Sertifikai, dan bimbingan teknis;
- 2) Program pengembangan kompetensi dari tahun ke tahun.

d. Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"

- 1) Meningkatnya capaian komponen perencanaan kinerja;
- 2) Meningkatnya capaian komponen pengukuran kinerja;
- 3) Meningkatnya capaian komponen pelaporan kinerja;
- 4) Meningkatnya capaian komponen kinerja organisasi.

e. Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

- 1) Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan keuangan dan barang antara lain melalui SIMRAL, SIMDA dan SIPD
- 2) Sistem pengendalian intern yang telah memadai.

f. Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan internal dan eksternal

- 1) Tindak lanjut atas temuan dari perangkat daerah direspons dengan baik;
- 2) Proses verifikasi tindak lanjut atas temuan dengan cepat;

g. Analisis keberhasilan capaian penerapan SPIP

- 1) Komitmen dari Walikota terhadap penerapan SPIP pada pemerintah Kota Bogor.
- 2) Komitmen dari Kepala Perangkat Daerah terhadap penerapan SPIP dan penyiapan bukti-bukti dalam implementasi.
- 3) Pembinaan dari BPKP Perwakilan Jawa Barat yang sangat intensif membantu Pemerintah Kota Bogor.
- 4) Telah dibentuk Satuan Tugas (Satgas) SPIP di masing-masing Perangkat Daerah yang terdiri dari Kepala, Sekretaris, Eselon III, Kasubag, dan Pelaksana.
- 5) Peran Inspektorat Daerah yang kuat dalam melakukan koordinasi dan mengarahkan Satgas SPIP di masing-masing Perangkat Daerah.
- 6) Pembinaan dan monitoring yang intensif dari Inspektorat Daerah terhadap Perangkat Daerah yang dilakukan uji sampel dalam penerapan SPIP.
- 7) Tim Inspektorat Daerah yang solid dan penuh dedikasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

h. Persentase Capaian MCP KPK

Meningkatnya langka-langkah perbaikan tata kelola pemerintah melalui: (1) Perencanaan dan Penganggaran APBD, (2) Pengadaan Barang dan Jasa, (3) Perizinan, (4)

Pengawasan APIP, (5) Manajemen ASN, (6) Optimalisasi Pajak Daerah dan (7) Manajemen Aset Daerah.

4. Analisis Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[\frac{\text{Realisasi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2021 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp16.647.657.802,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp17.223.043.441. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level perangkat daerah adalah 3,34% atau sebesar Rp575.385.639,00. Nilai efisiensi ini ditambah dengan nilai efisiensi refocusing sebesar Rp2.469.643.325,00 dari nilai pagu murni sebesar Rp19.792.686.766. Berdasarkan besaran penggunaan anggaran dan besaran refocusing anggaran, maka dapat diasumsikan telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya biaya pada Inspektorat Daerah Kota Bogor.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui rangkap penugasan Auditor dan P2UPD dalam melaksanakan pengawasan intern penyelenggaraan pemerintah daerah.

5. Capaian Program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Tabel 19 Capaian kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan penunjang keberhasilan kinerja sasaran Tahun 2021

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Kepuasan Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks	3,35	3,56		
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	Nilai	BB	A		
	Gap Analysis Kompetensi	%	30	21,62		
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	%	100	100		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja, RKA dan DPA tahun berikutnya	Dokumen	3	3	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
	Tersusunnya Dokumen PKPT tahun berikutnya	Dokumen	1	1		
	Dokumen Jankin tahun berjalan (IKU, IKK dan IKI)	Dokumen	3	3		
	Tersusunnya Peta Proses Bisnis, Cascading dan perubahannya	Dokumen	3	3		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan PERWALI TUSI	Dokumen	1	1		
	Tersusunnya Dokumen Perubahan RENSTRA PD	Dokumen	1	1		
	Tersusunnya Dokumen Risk Register Inspektorat tahun tahun berikutnya	Dokumen	1	1		
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKIP tahunan	Dokumen	1	1	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
	Tersusunnya Dokumen LKPJ tahunan	Dokumen	1	1		
	Tersusunnya Dokumen LPPD tahunan	Dokumen	1	1		
	Tersusunnya Laporan Pengawasan	Dokumen	1	1		
	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan ISO SMAP	Dokumen	1	1		
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat Daerah	Tahun	1	1		
Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Asn Inspektorat Daerah	orang	51	51	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	%	100	100		
Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Tersedianya sarana kerja dan penyimpanan arsip	Paket	1	1		
Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedia peralatan mesin penunjang urusan pemerintahan Inspektorat Daerah	Paket	9	9		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	TARGET	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah untuk kelancaran sarana dan prasarana Perangkat Daerah	%	100	100		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas Terpenuhinya pajak kendaraan operasional setiap satu tahun sekali	Unit Tahun	7 1	7 1	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC Split	unit	13	13		
	Terpeliharanya Mesin Pencacah Kertas	unit	11	11		
	Terpeliharanya Mesin Tik Elektrik	unit	1	1		
	Terpeliharanya PC/ Notebook	unit	43	43		
	Terpeliharanya Printer	unit	22	22		
	Terpeliharanya sound system	unit	1	1		
	Terpeliharanya jaringan internet	unit	1	1		
Sub Kegiatan: Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	1		
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan operasional Inspektorat Daerah	%	100	100		
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Bahan Komputer untuk pelaksanaan kegiatan Tersedianya ATK untuk pelaksanaan kegiatan Tersedianya peralatan /alat dapur Tersedianya PIN APIP Honorarium Tim PBJ kegiatan	Tahun Tahun paket buah OB	1 1 1 51 6	1 1 1 51 6	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengisian Tabung gas Isi Ulang Galon Air Mineral Pengadaan Barang Cetakn Pengadaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih Pengadaan tabung gas elpigi 12 kg Pengadaan alat listrik pakai habis	Tabung galon meter tahun buah tahun	48 540 39 1 3 1	48 540 39 1 3 1		
Sub Kegiatan: Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Tersedia barang cetakan, pengadaan dan penjilidan	Tahun	1	1		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleggara koordinasi/rapat dalam dan/atau luar kota kegiatan pengawasan PD dan pengawasan lainnya	Paket	7	7		
Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Langganan Surat Kabar Harian	bulan	12	12	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
	Pemenuhan Biaya Tagihan Air	bulan	12	12		
	Pemenuhan Biaya Tagihan Internet	bulan	12	12		
	Pemenuhan Biaya Tagihan Listrik	bulan	12	12		
	Pemenuhan Biaya Tagihan Telepon	bulan	12	12		
	Pemuatan Publikasi Kinerja	Kali	4	4		
	Pemeliharaan jaringan listrik	paket	1	1		
Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan Jasa Pengemudi	OB	26	26		
	Pemenuhan Jasa Pramubhakti	OB	13	13		
	Pemenuhan Jasa Tenaga FO	OB	26	26		
	Pemenuhan Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	OB	26	26		
	Pemenuhan Jasa Tenaga Keamanan	OB	26	26		
	Pemenuhan Jasa Tenaga Kebersihan	OB	26	26		
	Iuran Jaminan Kesehatan ketenagakerjaan dan kematian bagi Non-ASN	OB	396	396		
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kompetensi pengembangan sumber daya aparatur secara mandiri (PPSDAM)	Kali	8	8		
Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya pelatihan bagi APIP	Kali	8	8	pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
	Terlaksananya Pelatihan dan Sertifikasi Keahlian Fungsional Auditor	Peserta	4	4		
	Terlaksananya Pelatihan Sertifikasi ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan)	Kali	1	1		
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	70,27	75		
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100	100		
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	%	80	86,7		
	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	%	75	90,18		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	80	83,33		
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase capaian target pengawasan kinerja	%	100	100		
	Persentase capaian target pengawasan keuangan	%	100	100		
	Jumlah pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawas Internal	kegiatan	4	4		
	Jumlah Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawas eksternal	kegiatan	4	4		
Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Reviu LKPD	Lap	1	1	Situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 dengan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penyesuaian Sistem Kerja ASN menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat dilakukan sampai Triwulan III 2021, namun seiring situasi pandemi yang semakin membaik pelaksanaan sub	
	Reviu DAK	Lap	1	1		
Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen Pemeriksaan Kinerja	PD	9	9		
	Dokumen Reviu SSH, Analisis Standar Biaya, dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Tahun 2021	Dok	3	3		
	Dokumen Reviu Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan	Dok	1	1		
	Dokumen Reviu Kinerja UKPBJ	Dok	1	1		
	Dokumen Reviu Kinerja Perizinan	Dok	1	1		
Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Reviu Kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan	Dok	1	1		
	Dokumen pemeriksaan BOS	Laporan	1	1		
Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja	Dokumen Penyerapan Anggaran barang dan jasa	Kali	4	4		
	Reviu Dokumen Renstra	PD	36	36		
	Dokumen Reviu RPJMD	Dok	1	1		
	Dokumen Reviu RKPD	Dok	1	1		
	Dokumen Reviu RKPD Perubahan	Dok	1	1		
	Dokumen Reviu KUA PPAS	Dok	1	1		
	Reviu Dokumen RKA	PD	36	36		
	Reviu Dokumen RKA Perubahan	PD	36	36		
Sub Kegiatan: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Reviu Dokumen Evaluasi SAKIP	PD	36	36		
	Dokumen Reviu LAKIP	Dok	1	1		
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah pemantauan tindak lanjut	Pemantauan	8	8		
	Data Pelanggaran Kode Etik/Disiplin Pegawai	Laporan	1	1		
	Meningkatnya Pelayanan penanganan pengaduan	%	100	100		
Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Laporan Pelaksanaan Tugas Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD)	Dok	1	1		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Sub Kegiatan: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah PD yang dilakukan PD TT	Kali	12	12	kegiatan ini dapat terealisasi sesuai target	
Sub Kegiatan: Kerja sama Pengawasan Internal	Koordinasi dengan APH terkait laporan/pengaduan masyarakat yang bermuatan pelanggaran administrative dan pidana					
Program : Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persetase Perangkat Daerah Yang menerapkan SPIP	%	80	100		
	Jumlah Unit Kerja yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI menuju WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-		
	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,31	76,31		
Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Tersedianya dokumen kebijakan teknis di bidang pengawasan	Dokumen	6	6		
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Pengawasan	Dokumen SOP Bidang Pengawasan	Dok	6	6	Secara umum pelaksanaan sub kegiatan ini tidak mengalami permasalahan yang berarti	-
Sub Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Fasilitasi Pengawasan	SOP fasilitasi pengawasan BPK RI, APIP prov, Kementerian dalam Negeri, dan BPKP	Laporan	0	0		
Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	Meningkatnya Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP	%	70,27	70,27		
	Meningkatnya Perangkat Daerah yang Membangun ZI Meuju WBK	Unit Kerja	1	1		
	Meningkatnya pencapaian MCP KPC	%	80	80		
Sub Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen Risk Register Perangkat Daerah	Dok	36	36	Situasi dan kondisi Pandemi Covid-19 dengan Kebijakan	-
	Jumlah Pembinaan /monitoring kinerja PD	PD	36	36		
	FGD Peningkatan SPIP	PD	36	36		
	Pendampingan BPKP, Menpan dan Mendagri dalam mendukung Kegiatan Pengawasan Internal secara berkala	Kali	12	12		
	Jumlah PD yang dilakukan pembinaan /pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	PD	5	5		

Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
Sub Kegiatan: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi MCP	laporan	2	2	an Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Penyesuaian Sistem Kerja ASN menyebabkan beberapa rencana kegiatan tidak dapat dilaksanakan sampai Triwulan III 2021, namun seiring situasi pandemi yang semakin membaik pelaksanaan sub kegiatan ini dapat terlaksana pada Triwulan IV	
Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	sosialisasi Penegakan Integritas	Kali	1	1		
	Terlaksananya Survey Penilaian Integritas	Kali	1	1		
Sub Kegiatan: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah PD yang dilakukan Pembinaan dan Penilaian Internal Zi (WBK/WBBM)	PD	8	8		
	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zi	Kali	1	1		
	Terlaksananya pembinaan PD yang terkait penilaian PMPRB		2	2		

B. Realisasi Anggaran

Tahun 2021 Inspektorat Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran awal sebesar Rp19.792.686.766,00 dan selanjutnya mengalami refocusing anggaran menjadi Rp 17.223.043.441,00. Alokasi anggaran tersebut dijabarkan kedalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) sub kegiatan.

Penjelasan rinci alokasi anggaran dan realisasinya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 20 Alokasi dan realisasi anggaran tahun 2021

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Refocusing) Rp.	REALIASI (Rp)	REALIASI (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.353.484.666	17.057.503.341,00	16.568.789.202,00	97,13
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	135.760.000	128.680.000,00	109.110.000,00	84,79
1.1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	4.925.000	4.925.000,00	2.934.000,00	59,57
1.2	Evaluasi kinerja perangkat daerah	130.835.000	123.755.000,00	106.176.000,00	85,80
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	15.937.173.705	14.307.642.920,00	14.166.136.286,00	99,01
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan asn	15.937.173.705	14.307.642.920,00	14.166.136.286,00	99,01
3.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	867.420.000	358.378.000,00	282.733.000,00	78,89
3.1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	867.420.000	358.378.000,00	282.733.000,00	78,89
4.	Administrasi umum perangkat daerah	1.045.565.177	862.739.177,00	695.167.515,00	80,58
4.1	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.293.777	158.293.777,00	151.703.500,00	95,84
4.2	Penyediaan bahan logistik kantor	36.006.200	42.005.200,00	32.611.001,00	77,64
4.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.279.200	24.279.200,00	16.774.900,00	69,09
4.4	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	712.498.000	638.161.000,00	494.078.114,00	77,42
4.5	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada skpd	112.488.000	0,00	0,00	0,00
5	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	324.273.448	322.673.448,00	319.956.824,00	99,16
5.1	Pengadaan mebel	41.552.348	41.552.348,00	40.532.824,00	97,55
5.2	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	282.721.100	281.121.100,00	279.424.000,00	99,40
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	526.998.336	535.997.796,00	483.953.632,00	90,29
6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	190.075.000	199.074.460,00	169.976.462,00	85,38
6.2	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	336.923.336	336.923.336,00	313.977.170,00	93,19
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	516.294.000	541.392.000,00	511.731.945,00	94,52
7.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	263.430.000	263.430.000,00	240.807.845,00	91,41
7.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	57.500.000	57.500.000,00	54.323.800,00	94,48
7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	195.364.000	220.462.000,00	216.600.300,00	98,25
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	114.575.000	49.875.000,00	19.201.000,00	38,50
1	Penyelenggaraan pengawasan internal	27.975.000	27.975.000,00	16.151.000,00	57,73
1.2	Pengawasan kinerja pemerintah daerah	11.300.000	11.300.000,00	8.490.000,00	75,13
1.2	Pengawasan keuangan pemerintah daerah	4.500.000	4.500.000,00	4.087.600,00	90,84
1.3	Reviu laporan kinerja	6.925.000	6.925.000,00	3.016.600,00	43,56
1.4	Reviu laporan keuangan	2.250.000	2.250.000,00	556.800,00	24,75
1.5	Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bpk ri dan tindak lanjut hasil pemeriksaan apip	3.000.000	3.000.000,00	0,00	0,00
2.	Penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	86.600.000	21.900.000,00	3.050.000,00	13,93
2.1	Penanganan penyelesaian kerugian negara/daerah	43.100.000	12.350.000,00	0,00	0,00
2.2	Pengawasan dengan tujuan tertentu	43.500.000	9.550.000,00	3.050.000,00	31,94
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	324.627.100	115.665.100,00	59.667.600,00	51,59
1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan	12.870.000	9.670.000,00	5.123.600,00	52,98
1.1	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	12.870.000	9.670.000,00	5.123.600,00	52,98
2	Pendampingan dan asistensi	311.757.100	105.995.100,00	54.544.000,00	51,46
2.1	Pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	92.370.000	35.904.000,00	32.640.000,00	90,91
2.2	Pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	13.980.000	3.180.000,00	1.398.000,00	43,96

Kode	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU MURNI (Rp)	PAGU PERUBAHAN (Refocusing) Rp.	REALIASI (Rp)	REALIASI (%)
2.3	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3.180.000	3.180.000,00	0,00	0,00
2.4	Pendampingan, asistensi dan verifikasi penegakan integritas	202.227.100	63.731.100,00	20.506.000,00	32,18
	JUMLAH BELANJA DAERAH	19.792.686.766	17.223.043.441,00	16.647.657.802,00	96,66

BAB VI PENUTUP

Pencapaian keberhasilan Inspektorat dalam mencapai sasaran strategis terangkum dalam tabel berikut.

Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	% CAPAIAN
Tujuan: Terwujudnya tata kelola urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%
Sasaran 1 Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan Inspektorat Daerah	Level Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Sasaran 2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Pemerintah Daerah	Level Maturitas SPIP	Level	3	3	100%

Pencapaian berikutnya adalah keberhasilan menerapkan sistem manajemen anti penyuapan dengan diraihnya sertifikasi ISO 37001:2016 *Anti-Bribery Management Systems*.

Keberhasilan capaian kinerja program Inspektorat Daerah Kota Bogor Tahun 2021.

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja				Persentase	
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realiasi		
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.1	Nilai AKIP Inspektorat	Poin	A	A	100%
		1.2	Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Pengawasan Intern	Poin	3,35	3,56	106,26%
		1.3	Gap Analisis Kompetensi	%	30	21,62	127,93
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.1	Persentase PD yang mendapatkan Hasil Evaluasi SAKIP minimal "BB"	%	70,27%	75,00%	106,73%
		2.2	Persentase Pengelolaan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	%	80%	83,33%	104,16%
		2.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Internal	%	80	86,7	108,37%
		2.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi pengawasan Eksternal	%	75	90,18	120,24%

No	Sasaran Strategis / Program	Indikator Kinerja					Persentase
		Uraian Indikator Kinerja	Satuan	Vol Target	Realiasi		
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.1	Persentase Penerapan SPIP Pada Perangkat Daerah	%	80	100	125%
		3.2	Persentase Capaian MCP KPK	%	76,31	76,31	100%
		3.3	Jumlah PD yang diusulkan mendapatkan Predikat WBK/WBBM	Unit Kerja	-	-	-



Jl. Raya Padjajaran No. 05
Kec. Bogor Timur
Kota Bogor



Telp. (0251) 8313274
Fax. (0251) 8373229



inspektorat.kotabogor.go.id



[inspektorat_kotabogor](https://www.instagram.com/inspektorat_kotabogor)



[inspektorat Daerah Kota Bogor](https://www.youtube.com/channel/UC...)



[inspektoratBGR](https://twitter.com/inspektoratBGR)